



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
 BANYUWANGI - 68425

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 188/07/KEP/429.206/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/DPA-SKPD Tahun 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Kepala Daerah Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/73/KEP/429.011/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. R. AGUS MULYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196908201998031010

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 188/07/KEP/429.206/2025
 Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Nama/NIP/Gol	Keterangan Kegiatan
1	2	3	4
1	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	DARU SURYA PUTRA NIP 197305051998031011 Penata (III/c) Fungsional Perencanaan Ahli Muda Sub. Koordinator Penyusunan Program	1. Meneliti kelengkapan SPP/UP dan SPP/LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran; 2. Menyiapkan SPM; 3. Menyiapkan Laporan Keuangan.
2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	IRMA KURNIAWATI, S.Sos. NIP. 197012041990102001 Penata Tingkat I (III/d) Kasubbag Umum dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1	2	3	4
			<p>3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
		<p>NOVI KRISTINA SARI, SE NIP. 196705011994022003 Pengolah Data dan Informasi Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Paskibraka <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		<p>IRMA KURNIAWATI, S.Sos. NIP. 197012041990102001 Penata Tingkat I (III/d) Kasubbag Umum dan Keuangan</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1	2	3	4
			<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		<p>SARI NUR'AINI, S. AP NIP. 197102012006042015 Pengolah Data dan Informasi Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1	2	3	4
			2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. R. AGUS MULYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196908201998031010